



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Januari 2021

Halaman: 9



Isot

Moratorium Pembangunan

• Sambungan Hal 9

pandemi Covid-19, sehingga para investor pun dipastikan enggan melebarkan sayap.

"Salik sopo sek arep mbangun? Tidak diperpanjang pun pasti tetap di-hold. (Pengusaha) properti, pembangunan hotel, saya rasa realistis lah," tandas Haryadi.

"Ya, karena kondisinya masih seperti ini. Tapi, saya meminta agar ada perpanjangan lagi, dengan tetap mengecualikan bintang empat dan lima," tambahnya.

Sekadar informasi, moratorium telah diterapkan sejak 2014 silam. Namun, memasuki 2018, kebijakan soal pengendalian pembangunan hotel di kota pelajar mengalami revisi, hanya berlaku bagi hotel bintang tiga ke bawah. Sehingga, hotel bintang empat dan lima, tetap diberi izin.

Walau begitu, fasilitas penginapan berskala kecil, layaknya guest house, homestay dan pondok wisata, masih mendapat kelonggaran. Tetapi, meski boleh mengajukan, syarat yang harus dipenuhi cenderung

tidak mudah.

Lebih lanjut, Haryadi menegaskan, pihaknya ingin menjaga iklim pariwisata di Kota Yogyakarta. Namun, pandemi yang berkepanjangan, memang memberatkan upaya tersebut. Jumlah hotel bintang empat ke atas pun diyakini sulit bertambah jika wabah corona belum usai.

Sampai dengan saat ini, di Kota Yogyakarta tercatat ada 15 hotel bintang empat dan empat hotel bintang lima, meliputi Tentrem, The Phoenix Hotel, Melia Purosani dan Grand Aston. Kemudian, untuk hotel bintang tiga sejumlah 39 dan hotel bintang dua sekarang tercatat sebanyak 17.

"Kami sadar, tidak akan ada lah (yang membangun), situasi seperti ini. Kondisi hotel-hotel sekarang seperti itu, daripada membangun yang baru, mending beli saja hotel-hotel yang mau dijual," pungkas Wali Kota.

Perketat pengawasan
Kalangan legislatif menilai perpanjangan moratorium pembangunan hotel baru oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah tepat. Sebab, dengan persebaran yang sudah merata, dikhawatirkan muncul persaingan

yang kurang sehat jika jumlahnya bertambah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan, mengatakan, moratorium tersebut berpotensi meminimalisir kepadatan hotel di kota pelajar. Apalagi, dewasa ini semakin bermunculan deretan virtual hotel dan disebutkan cukup banyak melanggar legalitas terkait izin.

"Jadi, (perpanjangan moratorium) itu sangat tepat. Terlebih, tumbuh kembang hotel manajemen ini semakin menambah hiruk pikuk perhotelan di Kota Yogyakarta," katanya.

Oleh sebab itu, di samping memperpanjang moratorium, ia juga berharap supaya Pemkot Yogyakarta bisa memperkuat pengawasan terhadap suburnya virtual hotel.

"Difungsikan jadi hotel, tapi perizinannya rumah, kan ada itu yang masuk-masuk kampung juga. Setelah dilihat izinya, ternyata cuma tempat tinggal," tandasnya.

Pengawasan dan pemberian maraknya virtual hotel tersebut mendesak untuk diterapkan. Mereka berpotensi merugikan hotel-hotel yang tertib secara legalitas, serta membayar pajak pada pemerintah daerah. (aka)

• ke halaman 15

anjut

anggapi
etahui
rs

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005